

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan dalam penelitian ini adalah pemerintah sudah baik dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah setiap provinsi di Indonesia rata-rata sudah mencapai tingkat delegatif yang berarti Pendapatan Asli Daerah sudah lebih besar daripada bantuan transfer dari pemerintah pusat, sehingga pendapatan yang diperoleh tidak didominasi oleh bantuan pemerintah pusat melainkan melalui kemandirian daerah tersebut melalui sektor-sektor industri ataupun melalui UMKM serta dari pajak yang diterima. Dengan semakin mandiri daerah tersebut maka pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat dan jumlah penduduk miskin akan berkurang sehingga tingkat kesejahteraan akan meningkat.

Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh rasio efisiensi belanja yang menyatakan bahwa rasio efisiensi belanja berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin. Salah satu penyebabnya adalah 18 dari 34 provinsi di Indonesia tidak efisien dalam mengatur belanja daerah, tidak efisien menandakan bahwa realisasi belanja daerah lebih besar daripada anggaran belanja yang diterapkan. Menurut data Dirjen Perimbangan Keuangan, menyatakan bahwa selama tahun 2015-2016 27 dari 34 provinsi mengalami tren dimana mengalami tren dimana

belanja langsung berada dibawah 50%. Hal ini dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi terhambat dan jumlah penduduk miskin meningkat, karena belanja langsung atau belanja layanan publik adalah anggaran belanja yang digunakan pemerintah dalam program-programnya. Hal ini menjadi salah satu penyebab juga mengapa pemerintah tidak efisien mengelola belanja daerah. Semakin efisien belanja suatu daerah seharusnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi jumlah penduduk miskin, maka dari itu pemerintah harus bekerja lebih optimal dalam berbelanja sehingga hasil yang didapatkan akan efisien.

Hasil pengujian lainnya yaitu rasio efektivitas penerimaan PAD dan keserasian belanja tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk miskin. Pengujian pengaruh secara tidak langsung juga memberikan hasil bahwa kinerja keuangan daerah secara tidak langsung tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin melalui pertumbuhan ekonomi. Dapat diambil kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memediasi antara kinerja keuangan daerah dan jumlah penduduk miskin dan mungkin terdapat faktor selain pertumbuhan ekonomi yang dapat memediasi antara kinerja keuangan daerah dan jumlah penduduk miskin.

5.2. Keterbatasan dan Saran

Penelitian mengenai pengaruh kinerja keuangan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi masih sangat jarang ditemukan di Indonesia. Sebagian besar penelitian hanya menguji secara

deskriptif kinerja keuangan suatu daerah namun tidak dihubungkan dengan dampak yang diberikan dari kinerja keuangan daerah terhadap daerah tersebut. Hal ini menyebabkan referensi dan informasi lainnya yang terkait dengan topik ini belum banyak dibahas. Keterbatasan lainnya adalah peneliti sudah mencoba untuk menggunakan data tidak hanya tingkat provinsi, namun juga menggunakan data kabupaten/kota namun tidak tersedia untuk umum. Keterbatasan selanjutnya adalah peneliti sudah mencari indikator pertumbuhan ekonomi secara lebih spesifik yaitu Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dibanding Indeks Pembangunan Manusia, tetapi tidak dapat menemukan data tersebut.

Bagi peneliti selanjutnya dapat menguji ulang penelitian ini dan dapat menggunakan atau menambah objek penelitian, akan lebih baik juga menggunakan data tingkat kabupaten/kota dan tidak hanya tingkat provinsi supaya mendapatkan hasil yang baru. Saran lain yang bisa diberikan adalah menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi yang lebih langsung dan spesifik seperti PDB dan PDRB. Dengan demikian, penelitian mengenai topik ini dapat lebih dikembangkan untuk ke depannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badrudin, Rudy. (2012). *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Berliani, Kartika. (2016). *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Majalengka*. *Skripsi*. STIE Indonesia Membangun, Bandung.
- Boediono. (1999). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE
- Gozhali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. (2002). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Ekonisia
- _____. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul., dan M. S. Kusufi. (2014). *Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hartono, J. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman* (Edisi 6). Yogyakarta, Indonesia: BPFE.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). *Standar Akuntansi Keuangan Efektif per 1 Januari 2017*. Jakarta: IAI.
- Machmud, Amir. (2016). *Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Erlangga.

Mahmudi. (2007). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mahsun, Mohamad, 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Penerbit BPFE.Yogyakarta.

Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI offset.

Muhibtari, A.N. (2014). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2008-2012. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta

Ningsih, N.N., dkk. (2015). Dampak Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *Skripsi*. Universitas Udayana, Bali.

Niwana, E., dkk. (2014). Evaluasi Kinerja Keuangan Dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Pada Pemerintahan Kabupaten Bengkalis. *Skripsi*. Lembaga Penelitian Universitas Riau, Riau.

Nordiawan, Deddi. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Pramita, P.R. (2015). Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2013. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.

Suryaningsih, N.N. (2015). Dampak Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *Skripsi*. Universitas Udayana, Bali.

Syamsudin, dkk. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.

Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith, 2006. *Economic Development, 9th Edition*. New York: Pearson Addison Wesley.

Tuasikal, Askam. 2009. "Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah". Universitas Pattimura Ambon. Vol. 10, No.Juni. Hlm. 66-88

Utama, Suyana. (2009) .Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kinerja Pembangunan Daerah Bali Selatan Tahun 2001-2007. *Skripsi*. Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Udayana.

Wijyanti, N.K.H., dkk. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertumbuhan Ekonomi. *Skripsi*. Universitas Udayana, Bali.

Referensi Website

<https://www.bps.go.id/>

<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>

<https://www.setkab.go.id/>

<https://www.credit-suisse.com/corporate/en/research/research-institute/global-wealth-report.html>





Daftar Provinsi	IPM 2016	IPM 2017
ACEH	70	70.6
SUMATERA UTARA	70	70.57
SUMATERA BARAT	70.73	71.24
RIAU	71.2	71.79
JAMBI	69.62	69.99
SUMATERA SELATAN	68.24	68.86
BENGKULU	69.33	69.95
LAMPUNG	67.65	68.25
KEP. BANGKA BELITUNG	69.55	69.99
KEP. RIAU	73.99	74.45
DKI JAKARTA	79.6	80.06
JAWA BARAT	70.05	70.69
JAWA TENGAH	69.98	70.52
DI YOGYAKARTA	78.38	78.89
JAWA TIMUR	69.74	70.27
BANTEN	70.96	71.42
BALI	73.65	74.3
NUSA TENGGARA BARAT	65.81	66.58
NUSA TENGGARA TIMUR	63.13	63.73
KALIMANTAN BARAT	65.88	66.26
KALIMANTAN TENGAH	69.13	69.79
KALIMANTAN SELATAN	69.05	69.65
KALIMANTAN TIMUR	74.59	75.12
KALIMANTAN UTARA	69.2	69.84
SULAWESI UTARA	71.05	71.66
SULAWESI TENGAH	67.47	68.11
SULAWESI SELATAN	69.76	70.34
SULAWESI TENGGARA	69.31	69.86
GORONTALO	66.29	67.01
SULAWESI BARAT	63.6	64.3
MALUKU	67.6	68.19
MALUKU UTARA	66.63	67.2
PAPUA BARAT	62.21	62.99
PAPUA	58.05	59.09

Daftar Provinsi	% Penduduk Miskin 2016	% Penduduk Miskin 2017
ACEH	16.58	16.405
SUMATERA UTARA	10.31	9.75
SUMATERA BARAT	7.115	6.81
RIAU	7.825	7.595
JAMBI	5.91	6.095
SUMATERA SELATAN	5.13	5.25
BENGKULU	8.39	8.045
LAMPUNG	13.465	13.145
KEP. BANGKA BELITUNG	17.175	16.02
KEP. RIAU	14.075	13.365
DKI JAKARTA	3.75	3.775
JAWA BARAT	5.39	5.52
JAWA TENGAH	8.86	8.27
DI YOGYAKARTA	13.23	12.62
JAWA TIMUR	11.95	11.485
BANTEN	13.22	12.69
BALI	4.2	4.195
NUSA TENGGARA BARAT	22.1	21.615
NUSA TENGGARA TIMUR	16.25	15.56
KALIMANTAN BARAT	7.935	7.87
KALIMANTAN TENGAH	6.61	7.09
KALIMANTAN SELATAN	5.51	5.315
KALIMANTAN TIMUR	4.685	4.715
KALIMANTAN UTARA	6.055	6.135
SULAWESI UTARA	8.27	8
SULAWESI TENGAH	17.675	17.395
SULAWESI SELATAN	14.27	14.18
SULAWESI TENGGARA	12.825	12.39
GORONTALO	9.32	9.43
SULAWESI BARAT	11.465	11.24
MALUKU	19.22	18.37
MALUKU UTARA	6.37	6.395
PAPUA BARAT	28.47	27.69
PAPUA	25.155	24.11

Daftar Provinsi	% RKK 2015	% REP 2015	% REB 2015	% RBL 2015
Aceh	0.2045	1.0470	0.9514	0.4167
Sumatera Utara	1.3631	0.9290	0.9170	0.2415
Sumatera Barat	0.8754	1.0700	0.9929	0.4134
Riau	1.0138	0.9510	0.7264	0.4249
Kep. Riau	0.6753	0.8980	0.7096	0.4693
Kep. Bangka Belitung	0.4348	0.9930	0.8777	0.4220
Jambi	0.6578	1.0190	0.9751	0.4239
Sumatera Selatan	0.7399	0.9100	0.7852	0.4010
Bengkulu	0.4747	1.0090	1.0105	0.4843
Lampung	0.8916	0.9600	1.0123	0.4405
DKI Jakarta	3.8978	0.8870	0.7210	0.4852
Banten	2.1169	0.9690	0.9035	0.4112
Jawa Barat	2.0156	1.0110	0.9864	0.2114
Jawa Tengah	1.8521	0.9320	1.0279	0.2879
Jawa Timur	2.2700	1.0430	0.9673	0.3013
DI Yogyakarta	0.8874	1.0960	0.9459	0.4071
Bali	1.9058	1.0710	1.0019	0.2354
Nusa Tenggara Timur	0.3637	1.0630	1.0120	0.3586
Nusa Tenggara Barat	0.6618	1.0920	1.1240	0.4100
Kalimantan Barat	0.7198	0.7860	0.9021	0.2535
Kalimantan Utara	0.3690	1.0600	0.8008	0.6151
Kalimantan Tengah	0.5703	0.8390	0.9536	0.5263
Kalimantan Selatan	1.3248	0.8950	0.9726	0.4246
Kalimantan Timur	1.0992	0.8930	1.0931	0.4381
Sulawesi Utara	0.6693	0.9850	1.0194	0.4767
Gorontalo	0.2634	0.9100	0.9586	0.5495
Sulawesi Tengah	0.4541	1.0240	1.0408	0.3807
Sulawesi Tenggara	0.3733	1.2510	1.0118	0.4503
Sulawesi Selatan	1.1641	0.9670	0.9972	0.3518
Sulawesi Barat	0.2283	1.1410	1.0437	0.5704
Maluku	0.2244	0.6480	0.9679	0.4991
Maluku Utara	0.1574	0.9490	0.9338	0.5336
Papua	0.0838	1.0410	1.0386	0.4369
Papua Barat	0.0585	1.1130	1.0168	0.4712

Daftar Provinsi	% RKK 2016	% REP 2016	% REB 2016	% RBL 2016
Aceh	0.2000	1.0010	0.9414	0.4132
Sumatera Utara	0.9422	1.0700	0.9523	0.2415
Sumatera Barat	0.7501	1.0370	0.9434	0.4115
Riau	0.8123	0.8900	0.7958	0.4366
Kep. Riau	0.5956	0.9730	0.9375	0.4102
Kep. Bangka Belitung	0.4176	1.0120	0.8486	0.4157
Jambi	0.5712	0.9680	0.8804	0.4832
Sumatera Selatan	0.6330	0.9320	0.8610	0.2817
Bengkulu	0.4519	0.9810	0.8146	0.4204
Lampung	0.7404	0.9680	1.0219	0.3732
DKI Jakarta	2.4155	0.9380	0.7862	0.4674
Banten	1.7150	1.0420	1.0130	0.3461
Jawa Barat	1.6036	1.0530	0.9657	0.1966
Jawa Tengah	1.4326	0.8360	0.8630	0.2743
Jawa Timur	1.7380	1.0380	1.0351	0.2805
DI Yogyakarta	0.7553	1.0780	0.9184	0.4290
Bali	1.3805	0.9000	0.9503	0.2884
Nusa Tenggara Timur	0.3463	1.0290	0.9498	0.3262
Nusa Tenggara Barat	0.5254	0.9820	1.0528	0.3705
Kalimantan Barat	0.5891	0.8650	0.9036	0.3433
Kalimantan Utara	0.3206	1.5870	0.9370	0.5467
Kalimantan Tengah	0.4930	0.6820	0.7515	0.3952
Kalimantan Selatan	0.9320	0.8510	0.9942	0.4755
Kalimantan Timur	1.0210	0.7920	0.6850	0.4696
Sulawesi Utara	0.5216	0.8600	0.9152	0.4750
Gorontalo	0.2446	0.8910	0.9422	0.4661
Sulawesi Tengah	0.4239	0.9350	0.9355	0.5137
Sulawesi Tenggara	0.3691	1.3500	0.9621	0.4264
Sulawesi Selatan	0.9311	0.9820	1.0321	0.3025
Sulawesi Barat	0.1971	0.9960	0.8206	0.5326
Maluku	0.2240	0.8840	1.0068	0.5174
Maluku Utara	0.1626	0.9900	0.8644	0.5646
Papua	0.0883	0.9290	0.9272	0.4136
Papua Barat	0.0529	1.0710	0.9328	0.4872

Hasil Uji SPSS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		68
Normal Parameters ^{a, b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.06568376
Most Extreme Differences	Absolute	.093
	Positive	.093
	Negative	-.079
Kolmogorov-Smirnov Z		.766
Asymp. Sig. (2-tailed)		.600

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.000 ^a	.000	-.063	3.16150942	1.651

a. Predictors: (Constant), RBL, REP, REB, RKK

b. Dependent Variable: Unstandardized Residual

Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	.08884
Cases < Test Value	34
Cases >= Test Value	34
Total Cases	68
Number of Runs	30
Z	-1.222
Asymp. Sig. (2-tailed)	.222

Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.074E-14	5.407		.000	1.000		
	RKK	.000	.642	.000	.000	1.000	.756	1.322
	REP	.000	3.087	.000	.000	1.000	.884	1.131
	REB	.000	4.539	.000	.000	1.000	.810	1.234
	RBL	.000	4.800	.000	.000	1.000	.735	1.360

a. Dependent Variable: Unstandardized Residual

Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.671	3.644		-.184	.855
RKK	.119	.433	.039	.274	.785
REP	1.114	2.080	.071	.535	.594
REB	.966	3.059	.044	.316	.753
RBL	1.969	3.235	.089	.609	.545

a. Dependent Variable: ABS_RES

Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	72.451	5.407		13.399	.000
RKK	3.662	.642	.619	5.706	.000
REP	2.434	3.087	.079	.789	.433
REB	-11.142	4.539	-.257	-2.455	.017
RBL	4.916	4.800	.113	1.024	.310

a. Dependent Variable: IPM

Uji f

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	492.367	4	123.092	12.315	.000 ^a
	Residual	629.694	63	9.995		
	Total	1122.060	67			

a. Predictors: (Constant), RBL, REP, REB, RKK

b. Dependent Variable: IPM

Koefisien determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.662 ^a	.439	.403	3.1615094

a. Predictors: (Constant), RBL, REP, REB, RKK

b. Dependent Variable: IPM